



## Peran Organisasi Pendukung Partai dalam Komunikasi dan Sosialisasi Politik di Kabupaten Lampung Tengah

Marsha Dhita Pytaloka<sup>1\*</sup>, Hertanto<sup>2</sup>, Ari Darmasuti<sup>3</sup>

<sup>1-3</sup>Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan, Universitas Lampung, Indonesia

E-mail: [marshadhitap@gmail.com](mailto:marshadhitap@gmail.com)<sup>1</sup>, [hertanto.lpg@gmail.com](mailto:hertanto.lpg@gmail.com)<sup>2</sup>, [ari.darmastuti@fisip.unila.ac.id](mailto:ari.darmastuti@fisip.unila.ac.id)<sup>3</sup>

\*Penulis Korespondensi: [marshadhitap@gmail.com](mailto:marshadhitap@gmail.com)

**Abstract.** Political party support organizations play a crucial role in expanding the reach of party activities, particularly in the context of communication and political socialization at the local level. This study aims to examine how party support organizations carry out their political communication function, particularly in channeling and integrating community interests, while also analyzing their contribution to the political socialization process during the 2024 Legislative Elections in Central Lampung Regency. This study used a qualitative approach with a descriptive design. Data were obtained through in-depth interviews with 18 informants, participant observation, and documentation of organizational activities. Data analysis was conducted using an interactive model (Miles et al., 2020). The results indicate that party support organizations function as intermediaries between political parties and the community in establishing two-way communication. Furthermore, these organizations are able to absorb community aspirations at the local level and convey political information through a culturally and community-based approach. However, the effectiveness of this role still faces obstacles such as limited resources, low cadre capacity, and weak coordination between organizations. Furthermore, clientelism practices are still found (Rahman, 2021) and have the potential to reduce the quality of public political education. This study recommends strengthening organizational governance, increasing the capacity of digital-based cadres, and more systematically integrating supporting organizational networks to strengthen the institutionalization of political parties at the local level.

**Keywords:** Legislative Elections; Party Supporting Organizations; Political Communication; Political Socialization; Political Participation.

**Abstrak.** Organisasi pendukung partai politik memainkan peran penting dalam memperluas jangkauan aktivitas partai, khususnya dalam konteks komunikasi dan sosialisasi politik di tingkat lokal. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana organisasi pendukung partai menjalankan fungsi komunikasi politik, terutama dalam menyalurkan serta mengintegrasikan kepentingan masyarakat, sekaligus menganalisis kontribusinya dalam proses sosialisasi politik pada Pemilihan Legislatif 2024 di Kabupaten Lampung Tengah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap 18 informan, observasi partisipatif, serta dokumentasi kegiatan organisasi. Analisis data dilakukan dengan model interaktif (Miles et al., 2020). Hasil penelitian menunjukkan bahwa organisasi pendukung partai berfungsi sebagai perantara antara partai politik dan masyarakat dalam membangun komunikasi dua arah. Selain itu, organisasi ini mampu menyerap aspirasi masyarakat di tingkat lokal serta menyampaikan informasi politik melalui pendekatan berbasis budaya dan komunitas. Namun demikian, efektivitas peran tersebut masih menghadapi kendala seperti keterbatasan sumber daya, rendahnya kapasitas kader, serta lemahnya koordinasi antar organisasi. Di sisi lain, praktik klientelisme masih ditemukan (M. F. Rahman, 2021) dan berpotensi menurunkan kualitas pendidikan politik masyarakat. Penelitian ini merekomendasikan penguatan tata kelola organisasi, peningkatan kapasitas kader berbasis digital, serta integrasi jaringan organisasi pendukung secara lebih sistematis guna memperkuat pelembagaan partai politik di tingkat lokal.

**Kata kunci:** Komunikasi Politik; Organisasi Pendukung Partai; Partisipasi Pemilu; Pemilihan Legislatif; Sosialisasi Politik.

### 1. LATAR BELAKANG

Partai politik dalam sistem demokrasi modern memiliki fungsi yang luas, tidak hanya sebagai sarana rekrutmen politik tetapi juga sebagai media komunikasi dan sosialisasi politik kepada masyarakat. Dalam konteks demokrasi lokal, peran ini menjadi semakin penting karena partai dituntut mampu menjangkau masyarakat hingga tingkat akar rumput.

Namun demikian, keterbatasan struktur organisasi dan sumber daya menyebabkan partai politik seringkali tidak optimal dalam menjangkau masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan. Oleh karena itu, organisasi pendukung partai hadir sebagai aktor pelengkap yang memiliki fleksibilitas lebih tinggi dalam berinteraksi dengan masyarakat.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa organisasi pendukung partai memiliki peran strategis dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat (Pratama & Lestari, 2022). Selain itu, komunikasi politik yang dilakukan masih didominasi oleh pendekatan tatap muka dan belum optimal memanfaatkan teknologi digital (Hidayat, 2023). Kabupaten Lampung Tengah dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki karakteristik sosial yang beragam.

Pada Pemilu Legislatif 2024, organisasi pendukung partai terlihat aktif dalam kegiatan sosialisasi politik. Namun, kajian yang secara khusus membahas peran mereka masih terbatas. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran organisasi pendukung partai dalam komunikasi dan sosialisasi politik di Kabupaten Lampung Tengah.

## **2. TINJAUAN PUSTAKA**

### **Komunikasi Politik**

Komunikasi politik merupakan proses pertukaran pesan yang berkaitan dengan kekuasaan, kebijakan publik, dan kepentingan masyarakat yang bertujuan untuk memengaruhi sikap serta perilaku politik individu maupun kelompok (Miles et al., 2020). Dalam praktiknya, komunikasi politik tidak hanya bersifat satu arah dari elit kepada masyarakat, tetapi juga melibatkan interaksi timbal balik yang memungkinkan terjadinya dialog antara aktor politik dan konstituen.

Dalam konteks partai politik, komunikasi politik memiliki dua fungsi utama, yaitu artikulasi dan agregasi kepentingan. Artikulasi kepentingan merujuk pada proses penyampaian aspirasi masyarakat kepada partai politik, sedangkan agregasi kepentingan merupakan proses pengolahan berbagai aspirasi tersebut menjadi program atau kebijakan yang lebih terstruktur. Proses ini menjadi penting karena menentukan sejauh mana partai mampu merepresentasikan kepentingan publik secara efektif.

Organisasi pendukung partai memiliki posisi strategis dalam proses ini karena mampu menjangkau masyarakat secara lebih dekat dan informal. Melalui interaksi langsung, organisasi ini tidak hanya menyampaikan pesan politik, tetapi juga berfungsi sebagai saluran komunikasi yang menjembatani kebutuhan masyarakat dengan kepentingan partai.

## **Sosialisasi Politik**

Sosialisasi politik merupakan proses pembelajaran yang dialami individu dalam memahami nilai, norma, serta orientasi politik yang berlaku dalam suatu sistem politik (Nugroho, 2022). Proses ini berlangsung secara berkelanjutan dan melibatkan berbagai agen sosialisasi, seperti keluarga, lembaga pendidikan, media massa, serta organisasi sosial dan politik.

Dalam konteks masyarakat lokal, pendekatan sosialisasi berbasis komunitas terbukti lebih efektif dibandingkan metode formal. Hal ini disebabkan oleh adanya kedekatan sosial, kepercayaan, serta interaksi yang lebih intensif antara penyampai pesan dan masyarakat. Kegiatan seperti pengajian, arisan, maupun kegiatan sosial lainnya menjadi media yang efektif dalam menyampaikan pesan politik secara tidak langsung.

Selain itu, sosialisasi politik juga berperan dalam meningkatkan literasi politik masyarakat, terutama dalam memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara. Dengan sosialisasi yang baik, masyarakat diharapkan mampu berpartisipasi secara lebih rasional dan tidak mudah terpengaruh oleh praktik politik yang bersifat transaksional.

## **Organisasi Pendukung Partai**

Organisasi pendukung partai merupakan bagian dari struktur tidak langsung partai politik yang berfungsi memperluas basis dukungan serta memperkuat jaringan partai di tingkat masyarakat. Organisasi ini dapat berbentuk sayap partai, organisasi berbasis profesi, maupun kelompok masyarakat yang memiliki afiliasi dengan partai politik tertentu.

Peran utama organisasi pendukung meliputi mobilisasi massa, pendidikan politik, serta rekrutmen kader. Dalam praktiknya, organisasi ini memiliki fleksibilitas yang lebih tinggi dibandingkan struktur formal partai, sehingga mampu menyesuaikan pendekatan dengan kondisi sosial masyarakat setempat (Kusnadi & Fauzi, 2020). Selain itu, organisasi pendukung juga berfungsi sebagai *buffer zone* atau penyangga bagi partai politik.

Dalam situasi tertentu, organisasi ini dapat meredam tekanan publik terhadap partai, terutama ketika terjadi ketidakpuasan terhadap kebijakan atau kinerja elit politik (Wibowo & Sari, 2021). Dengan demikian, organisasi pendukung tidak hanya berperan sebagai alat mobilisasi, tetapi juga sebagai stabilisator hubungan antara partai dan masyarakat.

## **Kliantelisme Politik**

Kliantelisme merupakan pola hubungan yang bersifat timbal balik antara aktor politik dan masyarakat, yang didasarkan pada pertukaran antara dukungan politik dengan pemberian manfaat material atau simbolik. Dalam konteks politik lokal, praktik ini sering muncul dalam

bentuk distribusi bantuan sosial, pemberian uang, atau fasilitas tertentu kepada masyarakat menjelang pemilu (Aspinall & Berenschot, 2019).

(F. Rahman et al., 2021) menjelaskan bahwa hubungan klientelisme seringkali terbentuk melalui jaringan informal yang melibatkan organisasi pendukung partai. Organisasi ini menjadi perantara dalam menyalurkan bantuan dari aktor politik kepada masyarakat, sehingga memperkuat loyalitas politik dalam jangka pendek.

Meskipun efektif dalam meningkatkan dukungan elektoral, praktik klientelisme memiliki dampak negatif terhadap kualitas demokrasi. Orientasi politik masyarakat cenderung menjadi pragmatis dan transaksional, sehingga mengurangi kesadaran politik yang berbasis pada program dan ideologi. Oleh karena itu, penting untuk menyeimbangkan antara fungsi mobilisasi dan pendidikan politik agar tidak terjebak dalam pola klientelisme yang berkelanjutan.

### **Kerangka Teori: *Networking Institutionalism***

Penelitian ini menggunakan pendekatan *Networking Institutionalism* yang menekankan bahwa efektivitas suatu institusi politik tidak hanya ditentukan oleh struktur formal, tetapi juga oleh kualitas jaringan hubungan antar aktor yang terlibat di dalamnya (Rhodes et al., 2020). Dalam perspektif ini, institusi politik dipandang sebagai sistem yang terdiri dari berbagai aktor yang saling terhubung, baik secara formal maupun informal. Hubungan antar aktor tersebut membentuk jaringan yang memengaruhi proses pengambilan keputusan, distribusi sumber daya, serta legitimasi politik.

Organisasi pendukung partai dalam konteks ini berperan sebagai simpul (*node*) dalam jaringan kelembagaan partai. Keberadaan organisasi ini memperluas jangkauan partai dalam berinteraksi dengan masyarakat, sekaligus memperkuat aliran informasi dua arah. Semakin kuat dan terintegrasi jaringan tersebut, maka semakin efektif pula kinerja institusi politik dalam menjalankan fungsi komunikasi dan sosialisasi politik.

Namun demikian, teori ini juga menekankan bahwa jaringan yang tidak terkoordinasi dengan baik dapat menimbulkan inefisiensi, konflik internal, serta duplikasi peran. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme koordinasi yang jelas agar hubungan antar aktor dalam jaringan dapat berjalan secara optimal dan saling mendukung.

### **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif untuk memahami secara mendalam peran organisasi pendukung partai dalam komunikasi dan sosialisasi politik di Kabupaten Lampung Tengah. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada pemaknaan, pengalaman, serta interaksi sosial yang tidak dapat diukur secara kuantitatif, melainkan perlu dianalisis secara kontekstual.

#### **Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Pemilihan lokasi didasarkan pada karakteristik wilayah yang heterogen, meliputi kawasan perkotaan, semi-perkotaan, dan pedesaan. Secara spesifik, penelitian difokuskan pada tiga kecamatan, yaitu Gunung Sugih, Terbanggi Besar, dan Seputih Banyak, yang mewakili variasi kondisi sosial dan tingkat partisipasi politik masyarakat. Penelitian dilakukan dalam rentang waktu Maret hingga November 2024, yaitu pada periode setelah pelaksanaan Pemilihan Legislatif 2024, sehingga memungkinkan peneliti memperoleh data yang reflektif terhadap aktivitas politik yang telah berlangsung.

#### **Jenis dan Sumber Data**

Penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder: (1) Data primer, diperoleh secara langsung dari informan melalui wawancara mendalam dan observasi lapangan; (2) Data sekunder, diperoleh dari dokumen resmi, laporan kegiatan organisasi, serta data dari instansi terkait seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU).

#### **Teknik Penentuan Informan**

Informan dalam penelitian ini ditentukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Jumlah informan sebanyak 18 orang yang terdiri dari: (1) Pengurus partai politik tingkat daerah; (2) Pengurus organisasi pendukung partai; (3) Kader lapangan; (4) Masyarakat umum/non-kader. Pemilihan informan dilakukan dengan mempertimbangkan keterlibatan langsung dalam aktivitas organisasi serta pengetahuan terhadap proses komunikasi dan sosialisasi politik.

#### **Teknik Pengumpulan Data**

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui beberapa teknik, yaitu: (1) Wawancara mendalam (*in-depth interview*). Dilakukan secara semi-terstruktur untuk menggali informasi secara mendalam terkait peran organisasi pendukung partai. Wawancara memungkinkan peneliti memperoleh perspektif subjektif dari informan. (2) Observasi partisipatif, peneliti terlibat secara langsung dalam beberapa kegiatan organisasi pendukung partai, seperti rapat

koordinasi, kegiatan sosial, dan sosialisasi politik. Observasi ini bertujuan untuk memahami dinamika interaksi sosial secara nyata. (3) Dokumentasi, pengumpulan data melalui dokumen tertulis, seperti AD/ART organisasi, laporan kegiatan, serta dokumentasi visual kegiatan politik. Selain itu, peneliti juga mengkaji data dari media sosial dan pemberitaan lokal.

### **Teknik Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif yang dikemukakan oleh Miles, Huberman, dan Saldaña (2020), yang meliputi tiga tahapan utama: (1) Reduksi data (*data condensation*). Proses pemilihan, penyederhanaan, dan pengelompokan data yang relevan dengan fokus penelitian. (2) Penyajian data (*data display*). Data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk narasi deskriptif, tabel, atau matriks untuk memudahkan pemahaman pola dan hubungan antar variabel. (3) Penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing and verification*). Tahap ini dilakukan untuk merumuskan temuan penelitian serta memastikan konsistensi dan validitas data melalui proses pengecekan ulang.

### **Uji Keabsahan Data**

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan beberapa teknik, yaitu: (1) Triangulasi sumber: Membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan, seperti pengurus partai, organisasi pendukung, dan masyarakat. (2) Triangulasi metode: Membandingkan data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memperoleh hasil yang lebih valid. (3) Member *checking*. Peneliti melakukan konfirmasi kembali kepada beberapa informan kunci untuk memastikan bahwa interpretasi data sesuai dengan realitas yang dimaksud oleh informan.

## **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Peran Organisasi Pendukung Partai dalam Komunikasi Politik**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa organisasi pendukung partai di Kabupaten Lampung Tengah menjalankan fungsi komunikasi politik melalui pola komunikasi dua arah, yaitu komunikasi dari partai kepada masyarakat (*top-down*) dan dari masyarakat kepada partai (*bottom-up*). Pada pola komunikasi *top-down*, organisasi pendukung berperan sebagai saluran penyampaian informasi politik, seperti program partai, visi-misi calon legislatif, serta ajakan partisipasi dalam pemilu. Penyampaian pesan tersebut umumnya dilakukan melalui kegiatan berbasis komunitas yang bersifat informal, seperti pengajian, arisan, pertemuan warga, serta interaksi sosial sehari-hari.

Sementara itu, pada pola komunikasi *bottom-up*, organisasi pendukung berfungsi sebagai penyalur aspirasi masyarakat. Aspirasi yang muncul dari masyarakat, seperti kebutuhan infrastruktur, bantuan sosial, dan pelayanan publik, dihimpun melalui interaksi langsung, kemudian disampaikan kepada struktur partai. Dalam konteks ini, organisasi pendukung memiliki peran penting dalam fungsi artikulasi kepentingan, terutama di wilayah pedesaan yang cenderung memiliki keterbatasan akses terhadap struktur formal partai, namun penelitian ini menemukan bahwa fungsi agregasi kepentingan belum berjalan secara optimal. Aspirasi yang telah dihimpun belum sepenuhnya diolah menjadi agenda kebijakan yang sistematis. Hal ini disebabkan oleh lemahnya koordinasi antar organisasi pendukung, serta belum adanya mekanisme formal yang mengatur integrasi aspirasi dalam struktur partai (Wibowo & Sari, 2021).

Jika ditinjau melalui perspektif *Networking Institutionalism*, kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas komunikasi politik sangat bergantung pada kualitas jaringan antar aktor. Jaringan yang belum terintegrasi dengan baik akan menghambat aliran informasi dan mengurangi efektivitas fungsi kelembagaan partai (Rhodes et al., 2020).

### **Peran Organisasi Pendukung dalam Sosialisasi Politik**

Dalam aspek sosialisasi politik, organisasi pendukung partai memainkan peran penting dalam membentuk pemahaman politik masyarakat melalui pendekatan berbasis komunitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan seperti pengajian, bakti sosial, dan pelatihan kader menjadi media utama dalam menyampaikan nilai-nilai politik kepada masyarakat.

Pendekatan ini terbukti efektif karena memanfaatkan kedekatan sosial dan budaya yang telah terbangun dalam masyarakat. Sosialisasi politik tidak dilakukan secara formal dan kaku, melainkan disisipkan dalam kegiatan sosial yang lebih mudah diterima oleh masyarakat. Hal ini sejalan dengan temuan (Nugroho, 2022) yang menyatakan bahwa sosialisasi berbasis komunitas lebih efektif dalam membentuk orientasi politik, terutama bagi pemilih pemula. Sosialisasi yang dilakukan tidak hanya berfokus pada aspek ideologis, tetapi juga mencakup aspek praktis, seperti tata cara pemungutan suara, pentingnya partisipasi politik, serta pemahaman terhadap sistem pemilu.

Hal ini menunjukkan bahwa organisasi pendukung berkontribusi dalam meningkatkan literasi politik masyarakat, Namun demikian, keberlanjutan kegiatan sosialisasi masih menjadi tantangan. Sebagian besar kegiatan dilakukan secara intensif hanya pada periode menjelang pemilu, sehingga bersifat temporer dan tidak berkelanjutan. Di luar periode tersebut, aktivitas organisasi cenderung menurun.

Pemanfaatan teknologi digital dalam kegiatan sosialisasi masih terbatas. Organisasi pendukung belum secara optimal menggunakan media sosial sebagai sarana komunikasi politik, terutama dalam menjangkau pemilih muda. Hal ini disebabkan oleh rendahnya literasi digital di kalangan pengurus organisasi, sehingga potensi komunikasi berbasis digital belum dimanfaatkan secara maksimal (Sari & Nugraha, 2023).

Dalam perspektif kelembagaan, kondisi ini menunjukkan bahwa jaringan komunikasi politik masih didominasi oleh interaksi konvensional, sehingga belum mampu mengakomodasi perkembangan teknologi informasi secara optimal.

### **Tantangan Struktural dan Relasi Klientelisme**

Penelitian ini juga mengidentifikasi adanya praktik klientelisme dalam aktivitas organisasi pendukung partai. Praktik tersebut umumnya diwujudkan dalam bentuk distribusi bantuan kepada masyarakat, seperti sembako, bantuan keuangan, atau layanan sosial lainnya, yang berkaitan dengan kepentingan politik tertentu (M. F. Rahman, 2021).

Dalam jangka pendek, praktik ini terbukti efektif dalam meningkatkan dukungan politik karena mampu memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Namun, dalam jangka panjang, klientelisme berpotensi menurunkan kualitas partisipasi politik, karena orientasi masyarakat menjadi lebih bersifat pragmatis dan transaksional.

Penelitian ini menemukan beberapa tantangan utama yang dihadapi organisasi pendukung partai, yaitu: (1) Keterbatasan sumber daya finansial. Sebagian besar organisasi pendukung tidak memiliki sumber pendanaan yang stabil, sehingga aktivitas mereka sangat bergantung pada dukungan dari partai atau kandidat. (2) Rendahnya kapasitas sumber daya manusia. Pengurus organisasi umumnya memiliki keterbatasan dalam hal manajemen organisasi, komunikasi politik, serta pemanfaatan teknologi digital. (3) Koordinasi yang belum terstruktur. Hubungan antar organisasi pendukung dalam satu partai seringkali tidak terkoordinasi dengan baik, sehingga menimbulkan tumpang tindih program dan inefisiensi kegiatan. (4) Legitimasi organisasi. Tidak semua organisasi pendukung memiliki pengakuan formal yang jelas dari partai induk, sehingga memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat.

Jika dianalisis menggunakan kerangka *Networking Institutionalism*, berbagai tantangan tersebut menunjukkan bahwa jaringan organisasi pendukung belum terintegrasi secara optimal. Kelemahan dalam koordinasi dan kapasitas aktor menyebabkan jaringan kelembagaan tidak mampu berfungsi secara maksimal dalam mendukung efektivitas partai politik di tingkat lokal..

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Organisasi pendukung partai memiliki peran penting dalam komunikasi dan sosialisasi politik di tingkat lokal. Namun, efektivitas peran tersebut masih dipengaruhi oleh berbagai keterbatasan.

### Saran

Partai politik perlu memperkuat koordinasi internal dengan organisasi pendukung agar fungsi komunikasi, mobilisasi, dan sosialisasi politik dapat berjalan lebih efektif dan terintegrasi. Selain itu, pemerintah daerah juga memiliki peran penting dalam mendorong pendidikan politik masyarakat guna meningkatkan pemahaman politik, partisipasi demokratis, serta kualitas keterlibatan warga dalam proses politik lokal. Organisasi pendukung partai juga perlu meningkatkan kapasitas digital kader melalui pelatihan teknologi komunikasi, media sosial, dan strategi kampanye digital agar mampu beradaptasi dengan perkembangan politik di era digital. Sementara itu, untuk memperkaya kajian akademik, penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan kuantitatif guna mengukur secara lebih luas hubungan antara efektivitas organisasi pendukung partai, tingkat partisipasi politik, dan kualitas sosialisasi politik masyarakat.

## DAFTAR REFERENSI

- Aspinall, E., & Berenschot, W. (2019). *Democracy for sale: Elections, clientelism, and the state in Indonesia*. Cornell University Press.
- Dalton, R. J., Farrell, D. M., & McAllister, I. (2011). *Political parties and democratic linkage: How parties organize democracy*. Oxford University Press.
- Gunther, R., Montero, J. R., & Linz, J. J. (2002). *Political parties: Old concepts and new challenges*. Oxford University Press.
- Hidayat, T. (2023). Strategi komunikasi politik organisasi pendukung partai di era digital: Studi di Provinsi Lampung. *Jurnal Komunikasi Politik Indonesia*, 9(2), 112–130.
- Katz, R. S., & Crotty, W. (Eds.). (2006). *Handbook of party politics*.
- Kusnadi, A., & Fauzi, M. (2020). Peran organisasi sayap partai dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat pedesaan. *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Daerah*, 12(1), 45–63.
- Mainwaring, S., & Scully, T. R. (1995). *Building democratic institutions: Party systems in Latin America*. Stanford University Press.

- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook (4th ed.)*. Sage Publications.
- Norris, P. (2004). *Political communication*. In L. LeDuc, R. G. Niemi, & P. Norris (Eds.), *Comparing democracies 2: New challenges in the study of elections and voting* (pp. 222–243).
- Nugroho, S. (2022). Efektivitas sosialisasi politik berbasis komunitas dalam membangun orientasi politik pemilih pemula. *Jurnal Pendidikan Politik Masyarakat*, 7(1), 88–104.
- Pratama, R., & Lestari, D. (2022). Peran organisasi pendukung partai dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat di tingkat lokal. *Jurnal Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, 14(2), 201–218.
- Rahman, M. F. (2021). Relasi klientelisme dalam jaringan organisasi pendukung partai pada pemilu legislatif. *Jurnal Politik Lokal*, 6(2), 75–93.
- Rhodes, R. A. W., Binder, S. A., & Rockman, B. A. (2020). *The Oxford handbook of political institutions*. Oxford University Press.
- Sari, D., & Nugraha, A. (2023). Peran media sosial dalam meningkatkan partisipasi politik generasi muda. *Jurnal Komunikasi Publik*, 8(1), 23–35.
- Wibowo, H., & Sari, N. P. (2021). Efektivitas organisasi pendukung partai dalam pelebagaan partai politik di tingkat lokal. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 25(2), 156–172.